

DAMPAK PROGRAM BANTUAN KEUANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN LANNY JAYA

Amilien Sembor¹
Ida Ayu Purba Riani²
purbariani@feb.uncen.ac.id
Transna Putra Urip S³
Siti Aminah⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) mempengaruhi aktifitas perekonomian masyarakat, merubah pola masyarakat dalam mengelola usahanya, meningkatkan produksi masyarakat khususnya dalam bidang usaha ternak (babi dan kelinci), mempengaruhi pendapatan atau penghasilan masyarakat. Serta mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Program pemerintah bantuan keuangan usaha ekonomi produktif (UEP) di Kabupaten Lanny Jaya. Data yang digunakan merupakan dalam penelitian ini merupakan data primer bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara yang terhadap pelaku usaha dan pihak pemerintah. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program UEP berdampak secara *Expected Outcome*, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat untuk memulai usaha yang lain disamping bertani dan beternak yaitu usaha kios. Secara *Unexpected Outcome* yaitu meningkatnya kecakapan personal, kecakapan akademik, kecakapan vokasional dan kecakapan sosial. Dampak lainnya ada perubahan pola masyarakat dalam mengelola usahanya (ternak babi dan ternak kelinci), peningkatan produksi dari usaha masyarakat dan ada peningkatan pendapatan masyarakat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adalah adanya fasilitas pinjaman bantuan modal, dukungan dari berbagai pihak yaitu pemerintah desa, Badan BPMK dan masyarakat, sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah konsistensi warga yang belum mau diajak berkembang melalui usaha mandiri, pengalihan fungsi modal yang sempat mengalami kendala.

Kata Kunci : Bantuan Keuangan, Usaha Ekonomi Produktif

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan menjadi salah satu problem sosial yang amat serius. Masalah ini juga masalah yang tidak ada habisnya di bahas dan masalah yang telah lama ada. Pada masa lalu, umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kekurangan pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern saat ini mereka tidak memiliki fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman moderen.

Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen. Kondisi ini memburuk, pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75 persen. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 adalah tingginya tingkat inflasi akibat kenaikan

¹ Alumni Magister Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

⁴ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, berangsurangsur kondisi ini terus membaik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2010 sebesar 34,96 juta atau 15,42 persen.

Jumlah penduduk miskin tersebut sudah berkurang sebesar 2,21 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang berjumlah 37,17 juta atau 16,58 persen. Meskipun secara persentase telah terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin yang ada masih harus terus diturunkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya (Bappenas, 2015).

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Untuk itu, melalui Program Pemerintah Bantuan Keuangan Usaha Ekonomi Produktif bagi masyarakat diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan pendapatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pemerintah sejak tahun 2007 telah mencanangkan beberapa program nasional untuk pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari PNPM Mandiri dan Program Usaha Agribisnis Pedesaan serta Program Pemerintah Bantuan Keuangan Usaha Ekonomi Produktif yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Kabupaten Lanny Jaya termasuk salah satu yang masuk dalam Program Pemerintah Bantuan Keuangan Usaha Ekonomi Produktif karena lapisan masyarakatnya yang beragam dari mulai petani, pedagang, pejabat ataupun sopir yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup, akan tetapi lahan pertanian dalam kabupaten tersebut tidak begitu dapat memberikan hasil sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sekian banyak profesi diatas maka pekerjaan yang paling dominan untuk usaha mereka adalah petani sehingga untuk usaha tersebut mereka meminjam pada bank sebagai modal awal dan juga untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih baik.

Program Pemerintah Bantuan Keuangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diharapkan membawa perubahan yang positif baik dalam masalah lingkungan maupun perihal keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa Program Pemerintah Bantuan Keuangan Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten lanny jaya menarik untuk dibahas.

Pertama, dilihat dari sisi keuangan atau permodalan. Masyarakat Lanny Jaya dalam kesehariannya adalah masyarakat yang hidup dengan bercocok tani atau berkebun dan beternak sehingga untuk beralih profesi atau mencoba usaha lain seperti berdagang (kios) masih susah karena tidak mempunyai modal usaha. Yang Kedua dilihat dari sisi kegiatan yang muncul karena program Usaha Ekonomi Produktif yang mengakibatkan timbul adanya kerjasama antar warga masyarakat.

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain: Untuk mengetahui dan menganalisis dampak program pemerintah bantuan keuangan usaha ekonomi produktif (UEP) terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, pengelolaan usaha, peningkatan produksi masyarakat dan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui apakah dampak program usaha ekonomi produktif (UEP) mampu merubah pola masyarakat dalam mengelola usahanya. Untuk mengetahui apakah dampak program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dapat meningkatkan produksi masyarakat khususnya dalam bidang usaha ternak (babi dan kelinci). Untuk mengetahui apakah dampak program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) mempengaruhi pendapatan atau penghasilan masyarakat. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program pemerintah bantuan keuangan usaha ekonomi produktif (UEP) di Kabupaten Lanny Jaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Mardi Yatmo Hutomo, 2000).

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996). Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless).

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Usaha ekonomi masyarakat perdesaan merupakan salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat di perdesaan yang diyakini mampu bertahan di tengah tengah krisis yang melanda perekonomian suatu negara, karena pengelolannya langsung dan jauh dari intimidasi pihak luar. Pemerintah selalu berusaha memproteksinya sebagai upaya keseriusan Pemerintah dalam melindungi eksistensi perekonomian masyarakat. Usaha ekonomi masyarakat perdesaan adalah cerminan dari watak dan karakter perekonomian bangsa Indonesia yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam pengelolaan bahkan pengembangannya. Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Karena itu, pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dilakukan dengan baik dan jauh dari upaya yang mengeksploitasi potensi ekonomi masyarakat.

Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat berorientasi pada semangat kekeluargaan untuk membangun kesejahteraan bersama. Dalam upaya membangun usaha serta mengembangkannya, selain disatu sisi menjiwai semangat persaudaraan tapi disisi lain juga membutuhkan jiwa entrepreneurship (kewirausahaan), artinya bahwa pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dibutuhkan orang yang memiliki jiwa inovatif, kreatif serta berani mengambil resiko.

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama

secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan borrowers, memberikan informasi kepada borrower, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan (Mardi Yatmo Hutomo, 2000).

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komitmen dan kebijakan semua departemen. Sebab sekali lagi, dimensi yang harus ditangani dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, bersifat multi. Sumodiningrat (1999), memberikan konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- 3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumber daya manusia.
- 4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- 5) Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.
- 6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa: (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek; (2) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal

bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; (3) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasi ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; (4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Pirime (Ibukota Distrik Pirime) dan Kampung Amberingime (5 Km dari ibukota distrik), Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua.

Metode Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif. Data yang diperoleh dari masyarakat penerima bantuan yang dapat dibuktikan dengan opini – opini yang akan diolah dan analisa sesuai dengan metode analisis sehingga dapat terlihat hasilnya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara, pada para penerima bantuan yang ada di Kabupaten Lanny Jaya, termasuk *key informan* yaitu: Kepala Kampung, Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Pemerintah Kampung/Badan pemberdayaan Masyarakat.

Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian ilmiah sangat dibutuhkan data - data peristiwa sebagai sumber data yang memiliki kriteria tertentu dalam suatu penelitian. Untuk menghimpun dan mengumpulkan data dalam penelitian yang akurat dan relevan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan studi kepustakaan.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisa yang berdasarkan data dan dinyatakan dalam bentuk uraian. Data ini merupakan data yang berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada. Menurut Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu : Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Verifikasi (Conclusion Drawing).

Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang di peroleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok dan membuang data yang tidak perlu. Data yang telah direduksi mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Penyajian Data (Data Display)

Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984), menyatakan: “the most frequen from of display data for qualitative research data in the pas has beeb narrative tex” artinya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data juga dapat berupa grafik, matriks dan network (Jaringan kerja).

Verifikasi (Concluding Drawing)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan data yang kuat pada tahap pengumpulan data. Namun bila

kesimpulan didukung oleh data yang valid, peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Keuangan Usaha Ekonomi Produktif

Program Pemerintah Bantuan Keuangan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya diberikan dengan tujuan untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat (kepala keluarga) di seluruh kabupaten Lanny Jaya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap juga bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha ternaknya (ternak babi dan ternak kelinci).

Melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, 10 (sepuluh) Kepala Distrik di Kabupaten Lanny Jaya, Yaitu Distrik Tiom, Distrik Tiomneri, Distrik Melagaineri, Distrik Kuyawage, Distrik Poga, Distrik Dimba, Distrik Gamelia, Distrik Balingga dan Distrik Beam untuk mendata semua kepala keluarga yang tidak mempunyai penghasilan tetap per bulan atau yang tidak bekerja dan mengarahkan masyarakat tersebut untuk membuka rekening di bank agar dana Bantuan data disalurkan kepada masyarakat.

Dengan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah Lanny Jaya pada Tahun 2013 mengalokasikan dana senilai Rp. 42.900.000.000 (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) sebagai dana bantuan usaha ekonomi produktif (UEP), sebagai berikut.

Tabel 1.
Data Pembagian Dana UEP Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2013

No.	Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah KK	Alokasi Dana UEP (Rp)
1	Pirime	22	2492	12.460.000.000
2	Tiomneri	12	1069	5.345.000.000
3	Gamelia	8	1494	7.495.000.000
4	Tiom	15	1333	6.665.000.000
5	Dimba	9	1205	6.025.000.000
6	Poga	8	791	3.955.000.000
7	Makki	2	191	955.000.000
Total		76	8575	42.900.000.000

Sumber : BPMK Kabupaten Lanny Jaya, 2013

Sedangkan pada tahun 2014, terdapat alokasi dana UEP senilai Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) sebagai dana bantuan usaha ekonomi produktif (UEP), yang terdistribusi kepada masyarakat sebagai berikut.

Tabel 2.
Data Pembagian Dana UEP Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2014

No.	Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah KK	Alokasi Dana UEP (Rp)
1	Tiom	6	986	2.465.000.000
2	Gamelia	4	646	1.615.000.000
3	Poga	2	147	367.500.000
4	Pirime	3	301	752.500.000
5	Beam	3	344	1.720.000.000
6	Kuyawage	9	1409	5.447.500.000

7	Balingga	14	2034	5.360.000.000
8	Malagaineri	5	650	2.272.500.000
Total		46	6517	20.000.000.000

Sumber : BPMK Kabupaten Lanny Jaya, 2014

Dampak Program Pemerintah Bantuan Keuangan Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif

Kegiatan pemerintah pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat keberdayaan masyarakat. Program pemerintah melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kabupaten Lanny Jaya memiliki dampak positif bagi masyarakat penerima bantuan. Dampak program yang dirasakan masyarakat ada 2 (dua):

Expected Outcome yang sesuai dengan tujuan dan sasaran program

Dampak dari bantuan usaha ekonomi produktif yang dirasakan langsung oleh masyarakat setelah mendapat dana bantuan usaha ekonomi produktif dan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung terjadi perubahan pola masyarakat dalam mengelola usaha ternaknya (ternak babi dan ternak kelinci). Dan juga terdapat masyarakat yang mulai untuk membuka usaha baru seperti berdagang (kios) kecil yang menjual kebutuhan pokok seperti beras, gula, garam, minyak goreng, dan sebagainya.

Tabel 3.
Program Usaha Ekonomi Produktif

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Bantuan	Jenis Usaha Ekonomi Produktif
1.	Elisabeth Kogoya	Kampung Pirime	Rp. 5 Juta	Ternak Babi
2.	Dekisa Wanimbo	Kampung Pirime	Rp. 5 Juta	Kios
3.	Litara Yigibalom	Kampung Pirime	Rp. 5 Juta	Ternak Kelinci
4.	Yandinggen Wenda	Kampung Amberingime	Rp. 5 Juta	Ternak Kelinci

Sumber : Hasil Wawancara, 2017

Berdasarkan hasil wawancara dapat di ketahui bahwa masyarakat penerima bantuan usaha ekonomi produktif di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya mulai mengembangkan usahanya dengan baik, walaupun modal yang diterima tidak terlalu besar nilainya, serta diarahkan untuk kegiatan usaha pembukaan kios dan peternakan babi dan kelinci.

Unexpected Outcome merupakan dampak program lainnya: Kecakapan Personal

Kecakapan personal adalah keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak seperti sikap dan perilaku, motivasi serta keinginan. Program pemerintah melalui Program Usaha Ekonomi Produktif oleh masyarakat telah memberi dampak positif dalam kecakapan personal. Dalam hal mengenali potensi dan ketertarikan diri, contohnya sebagai berikut:

Tabel 4.
Persepsi Responden Tentang Dampak Terhadap Kecakapan Personal

No.	Nama Responden	Jabatan	Persepsi
Kampung Pirime			
1.	Umbanume Doi Wenda	Kepala Kampung	Masyarakat berusaha membuat kios, membuat kandang untuk ternak yang dipelihara
2.	Alikone Wenda	Tokoh Masyarakat	Dahulu belum ada kios harus ke kota untuk beli beras, sekarang beras bisa dibeli di

			kampung
3.	Pdt. Sebeno Kogoya	Tokoh Agama	Beli sembako beras, garam dan gula di Kampung tidak ke kota
4.	Melius Wakerkwa	Tokoh Pemuda	Percaya diri dalam membuka usaha karena dapat bantuan modal
5.	Osman Jikwa	Kepala BPMK	Distribusi pemasaran ternak lebih lancar karena kegiatan produksi terjamin dan ketersediaan transportasi
Kampung Amberingime			
1.	Pindias Wanimo	Kepala Kampung	Ternak Babi dan Kelinci sangat berkembang kecuali usaha kios masih terbatas (1 orang)
2.	Daniel Wakerkwa	Tokoh Masyarakat	Terkendala jarak (transportasi) menyebabkan bantuan dana tidak berdampak
3.	Pdt. Perius Wakerkwa	Tokoh Agama	Masyarakat kesulitan untuk menentukan ide jenis usaha yang dikembangkan. Ternak Babi dan Kelinci sudah terbiasa dengan melepas secara liar tanpa dikandangan
4.	Peuda Kogoyo	Tokoh Pemuda	Jumlah dana bantuan masih kurang jadi kebingungan untuk dikelola.

Sumber : Hasil Wawancara, 2017

Dapat disimpulkan bahwa warga memiliki dampak positif dalam kecakapan personal. Kecakapan personal yang dimiliki antara lain dalam hal masyarakat sudah mulai mengerti tentang usaha tapi ada yang tidak punya modal sehingga baru memulai dengan modal yang diberikan pemerintah. Masyarakat sudah mulai merubah pola hidup yang dulunya ternak dibiarkan berkeliaran sekarang sudah mulai dibuat kandang-kandang untuk memelihara dan memberi makan ternaknya dengan baik.

Kecakapan Akademik

Kecakapan akademik merupakan kecakapan yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan wawasan. Berikut adalah hasil wawancara terhadap sejumlah responden berkaitan dengan kecakapan akademik.

Tabel 5.
Persepsi Responden Tentang Dampak Terhadap Kecakapan Akademik

No.	Nama Responden	Jabatan	Persepsi
Kampung Pirime			
1.	Umbanume Doi Wenda	Kepala Kampung	Untuk usaha ternak lumayan berkembang karena sudah diusahakan sejak lama, namun untuk kios dalam proses pembelajaran

2.	Alikone Wenda	Tokoh Masyarakat	Masyarakat secara bertahap sudah mulai mengerti tentang cara mengembangkan usaha
3.	Pdt. Sebena Kogoya	Tokoh Agama	Masyarakat masih perlu belajar teknis penetapan harga jual komoditas sembako
4.	Melius Wakerkwa	Tokoh Pemuda	Masyarakat masih perlu belajar teknis penetapan harga jual komoditas sembako
5.	Osman Jikwa	Kepala BPMK	Perekonomian kampung mulai berkembang dengan baik, sebagian masyarakat pelaku usaha memiliki pendidikan setingkat SMA (Pemuda).
Kampung Amberingime			
1.	Pindias Wanimbo	Kepala Kampung	Masyarakat masih butuh sosialisasi dan bimbingan untuk menjalankan usaha secara profesional
2.	Daniel Wakerkwa	Tokoh Masyarakat	Kendala jarak dan transportasi menghambat proses penjualan ternak
3.	Pdt. Perius Wakerkwa	Tokoh Agama	Sebagian masyarakat berupaya untuk belajar buka usaha
4.	Peuda Kogoyo	Tokoh Pemuda	Bantuan usaha mungkin tidak dalam bentuk tunai namun, bibit ternak dan sembako untuk dikembangkan

Sumber : Hasil Wawancara, 2017

Dengan seiring bertambahnya pengetahuan dan wawasan tentang dunia bisnis atau pengetahuan umum yang dialami para warga, maka semakin timbullah ketertarikan dengan dunia usaha atau dengan wirausaha. Dengan mengikuti Program Usaha Ekonomi Produktif masyarakat memiliki wawasan dan motivasi yang lebih. Berbekal kecakapan tersebut, warga lebih paham dalam membaca dan memanfaatkan peluang di sekitarnya.

Berdasarkan jawaban dari responden di atas, dapat disimpulkan bahwa kecakapan akademik yang dimiliki warga mengalami dampak positif. Masyarakat memiliki wawasan usaha atau pengetahuan umum yang lebih. Disamping itu, masyarakat lebih termotivasi untuk beriwirausaha, walaupun hasilnya belum maksimal. Dengan meningkatnya wawasan masyarakat tentang dunia usaha, warga lebih paham dalam membaca dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat organisasi, ekonomi hingga promosi.

Kecakapan Vokasional

Kecakapan Vokasional merupakan kecapakan yang di kaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Kegiatan pemberdayaan, baik masyarakat maupun pemuda erat kaitannya dengan kegiatan yang bersifat vokasional atau hal-hal yang menyangkut dengan ketrampilan atau lifeskills. Dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis ketrampilan, masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Lanny Jaya dalam program Usaha Ekonomi Produktif memiliki ketrampilan-ketrampilan yang beragam. Disamping itu, masyarakat terdorong untuk membuka usaha secara mandiri atau bekerja dengan berbekal keinginan dan kemampuan yang dimiliki terus didorong oleh pemerintah dalam hal pemberi bantuan langsung.

Tabel 6.
Persepsi Responden Tentang Dampak Terhadap Kecakapan Vokasional

No.	Nama Responden	Jabatan	Persepsi
<i>Kampung Pirime</i>			
1.	Umbanume Doi Wenda	Kepala Kampung	Sejak adanya bantuan ada interaksi antar masyarakat dalam meningkatkan keterampilan berusaha
2.	Alikone Wenda	Tokoh Masyarakat	Masyarakat mulai belajar untuk membuka usaha kios
3.	Pdt. Sebena Kogoya	Tokoh Agama	Bantuan dana menurut masyarakat merupakan berkat yang perlu digunakan dengan sebaik-baiknya
4.	Melius Wakerkwa	Tokoh Pemuda	Perlu ada pelatihan usaha dari pemerintah, agar masyarakat mengerti cara mengelola usaha
5.	Osman Jikwa	Kepala BPMK	Harus ada pelatihan secara terus menerus sampai masyarakat mandiri dalam berwirausaha
<i>Kampung Amberingime</i>			
1.	Pindias Wanimbo	Kepala Kampung	Masyarakat butuh perhatian lebih karena sebagian tidak mengenyam pendidikan formal
2.	Daniel Wakerkwa	Tokoh Masyarakat	Dukungan infrastruktur transportasi dari pemerintah
3.	Pdt. Perius Wakerkwa	Tokoh Agama	Masyarakat masih selalu berharap bantuan pemerintah dan mensyukuri sebagai berkat dari Tuhan
4.	Peuda Kogoyo	Tokoh Pemuda	Perlu arahan dan bimbingan dari pemerintah terutama bagi kaum pemuda dan pemudi dalam mengembangkan potensi diri.

Sumber : Hasil Wawancara, 2017

Berdasarkan hasil wawancara dapat di ketahui bahwa masyarakat penerima bantuan keuangan Melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kabupaten lanny jaya memiliki kecakapan vokasional yang cukup baik. Dari segi wawasan dan pengetahuan, perlu diberikan pelatihan atau sosialisasi juga contoh bacaan yang bisa membantu masyarakat mengelola usaha yang ada.

Kecakapan Sosial

Kecapakan Sosial adalah kecapakan yang dimiliki seseorang untuk mampu berkomunikasi lisan, berkomunikasi tertulis dan bekerja sama. Berikut persepsi responden kunci terkait dampak UEP terhadap kecakapan sosial.

Tabel 7.
Persepsi Responden Tentang Dampak Terhadap Kecakapan Sosial

No.	Nama Responden	Jabatan	Persepsi
Kampung Pirime			
1.	Umbanume Doi Wenda	Kepala Kampung	Bantuan UEP menyebabkan terjadinya interaksi (kerjasama & komunikasi) antara masyarakat
2.	Alikone Wenda	Tokoh Masyarakat	Masyarakat lebih proaktif untuk menjalin komunikasi dengan pihak lain terkait pengembangan usahanya masing-masing
3.	Pdt. Sebenar Kogoya	Tokoh Agama	Komunikasi dalam rangka pengembangan usaha sangat penting untuk menjalin kerukunan
4.	Melius Wakerkwa	Tokoh Pemuda	Banyak pemuda yang berkeinginan untuk mencari informasi tentang cara berwirausaha yang baik
5.	Osman Jikwa	Kepala BPMK	Semua pihak saling berkomunikasi dengan baik
Kampung Amberingime			
1.	Pindias Wanimo	Kepala Kampung	
2.	Daniel Wakerkwa	Tokoh Masyarakat	
3.	Pdt. Perius Wakerkwa	Tokoh Agama	
4.	Peuda Kogoyo	Tokoh Pemuda	

Sumber : Hasil Wawancara, 2017

- a. Pindias Wanimo (Kepala Kampung Amberingime) mengatakan untuk usaha masyarakat harus saling bertanya agar bisa mengerti cara usaha dan mulai untuk mengerjakannya.
- b. Daniel Wakerkwa (Tokoh Masyarakat) mengatakan masyarakat disini jauh dari kota maka perlu kerja sama dan komunikasi semua warga untuk bisa saling menutupi kekurangan usahanya untuk bisa berkembang.
- c. Pdt. Perius Wakerkwa (Tokoh Agama) mengatakan bantuan ini menjadikan bantuan jadi sarana untuk berkomunikasi dan bekerja sama.
- d. Peuda Kogoya (Tokoh Pemuda) mengatakan untuk bantuan ini membuat harus lebih aktif dalam bertanya dan bekerja sama sehingga dapat di temukan potensi yang ada di masyarakat untuk berusaha.
- e. Osman Jikwa (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung), dengan adanya bantuan usaha ekonomi produktif, perekonomian di kampung Amberingime mampu bekerja secara gotong royong membantu warga yang lain dalam membuat usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian sosial dengan lingkungan sekitar dengan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi maupun desa dengan demikian masyarakat merasa antusias, terbantu dan lebih mengenal potensi-potensi wilayah yang perlu dikembangkan. Terkait dengan kerjasama dan tanggung jawab, warga mampu bekerjasama dan bertanggung jawab, meskipun terdapat beberapa yang belum maksimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pemerintah Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif Di Kabupaten Lanny Jaya

Pelaksanaan suatu program pemberdayaan masyarakat tentulah memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik output maupun outcome, hal yang demikian tidak lepas dalam program pemerintah. Konsep pemberdayaan masyarakat maupun pemuda tidak semata-mata muncul tanpa ada tujuan. Menurut Ambar (2004: 80) tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Terkait dengan kegiatan pemberdayaan, erat kaitannya dengan peningkatan wawasan dan kecakapan/ lifeskills. Terkait dengan kecakapan, Ditjen Diklusepa (2003: 7) mengelompokkan indikator-indikatornya sebagai a) Personal Skills atau kecakapan personal, b) Thinking Skills atau kecakapan berpikir dengan mengintegrasikan Academic Skills, c) Social Skills atau kecakapan sosial, d) Vokasional Skills atau kecakapan kejuruan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Lanny Jaya, dapat diketahui bahwa masyarakat sekitar mendapatkan dampak positif dari pelaksanaan program Usaha Ekonomi Produktif. Dari segi kecakapan personal, warga mampu lebih mengenal potensi dan ketertarikan dirinya dalam bidang- bidang tertentu. Mereka diberikan akses yang seluas-luasnya untuk mengekspos apa yang mereka punya dan apa yang mereka inginkan.

Dilihat dari sisi akademik, warga mempunyai wawasan yang lebih dengan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama. Mereka tertarik, dan terdorong untuk berwirausaha, ada pula yang sudah berkecimpung dalam dunia usaha dan mengembangkannya dengan bekerja sama dengan warga walaupun belum dalam skala yang besar. Dengan adanya kegiatan Usaha Ekonomi Produktif warga bisa dan lebih peka membaca peluang usaha dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk perkembangan usahanya.

Beralih ke sisi vokasional atau kejuruan, warga mempunyai ketrampilan yang lebih banyak karena kegiatan-kegiatan warga yang beragam terkait dengan keterampilan misalnya warung makan, ternak babi, ternak kelinci, dan kios, dll. Dalam hal pembukaan usaha mandiri, warga lebih terdorong untuk membuka usaha mandiri dan mengembangkan usahanya namun belum maksimal. Terdapat warga yang sudah merealisasikannya namun ada juga yang belum berani untuk mengambil resiko dalam usaha mandiri. Nilai tambah yang didapatkan oleh warga adalah mereka mendapat pendapatan tambahan walaupun memang belum begitu banyak dengan usaha mandiri yang mereka kerjakan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa warga mendapatkan banyak dampak yang positif yang didapatkan dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan pemuda melalui program usaha ekonomi produktif di kabupaten lanny jaya. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang diperoleh belum optimal sehingga pihak yang terkait terus senantiasa berusaha dan memperbaikinya. Dampak yang dirasakan mencakup segi personal skills atau kecakapan personal, academic skills atau kecakapan akademik, vokasional skills atau kecapakan kejuruan dan social skills atau kecakapan sosial.

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang mendukung terselenggaranya pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif Di kabupaten lanny jaya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui berbagai faktor pendukung terselenggaranya pelaksanaan Program pemerintah melalui program Usaha Ekonomi Produktif di kabupaten lanny jaya antara lain fasilitas yang diperoleh warga untuk berwirausaha menjadikan daya tarik tersendiri warga untuk bergabung dalam program usaha ekonomi produktif. Dukungan dari dinas sosial, pemerintah desa dan masyarakat. Kemudahan berkomunikasi menjadi jembatan yang menghubungkan program usaha ekonomi produktif dengan seluruh elemen yang terkait, baik elemen dari tingkat pemerintah seperti dinas sosial dan pemerintah desa maupun non pemerintah seperti organisasi sosial lain hingga masyarakat sekitar. Masyarakat di kabupaten lanny jaya sangat antusias dan senang dengan adanya kegiatan tersebut.

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat terselenggaranya pelaksanaan program usaha ekonomi produktif Di kabupaten lanny jaya. Di samping terdapat faktor pendukung, pasti tidak lepas dari faktor penghambat. Semangat yang masih berubah-ubah menjadikan salah satu faktor penghambat keberlangsungan program. Konsistensi warga yang masih statis dan terdapat warga

yang belum mau diajak berkembang masih terus diperbaiki. Modal bergilir yang sempat mengalami kendala menjadi salah satu faktor tersendatnya program usaha ekonomi produktif. Hal tersebut disebabkan karena modal sempat dipinjam dan belum dikembalikan sehingga berdampak pada belum maksimalnya dan meratanya program tersebut untuk seluruh warga yang tertarik pada dunia usaha. Selain itu kesibukan warga dan pengurus yang makin hari semakin banyak dan berbeda-beda mengakibatkan kurang maksimalnya program tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak program pemerintah melalui program usaha ekonomi produktif di Kabupaten Lanny Jaya, dapat ditelusuri melalui:
 - a. Expected Outcome yaitu dampak yang sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Pelaksanaan program ini dirasakan memberikan dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Dengan menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat untuk memulai usaha yang lain disamping bertani dan beternak. Juga ada masyarakat yang mulai berani untuk mau buka usaha kios.
 - b. Unexpected Outcome yaitu merupakan dampak program lainnya seperti kecakapan personal, kecakapan akademik, kecakapan vokasional dan kecakapan social.
2. Terdapat perubahan pola masyarakat dalam mengelola usahanya (ternak babi dan ternak kelinci).
3. Terdapat peningkatan produksi dari usaha masyarakat.
4. Terjadi penambahan pendapatan masyarakat karena pola pengelolaan usaha yang berubah yang mengakibatkan produksi meningkat sehingga dapat dipasarkan untuk menambah penghasilan atau pendapatan masyarakat.
5. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adalah adanya dana bantuan usaha ekonomi produktif pemerintah, dan dukungan dari berbagai pihak yaitu pemerintah desa, BPMK dan antar masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah konsistensi warga yang belum mau diajak berkembang melalui usaha mandiri, dan pengalihan fungsi modal yang sempat mengalami kendala.

Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Program pemerintah melalui program usaha ekonomi produktif di Kabupaten Lanny Jaya, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi warga penerima bantuan agar memaksimalkan penggunaan dana bantuan dari pemerintah tersebut pada usaha-usaha ekonomi produktif walaupun dilakukan dalam skala yang kecil.
2. Bagi pemerintah daerah tetap menjaga keberlangsungan program ini dengan bermitra pada sejumlah pihak yang dapat memberikan kontribusi terhadap.
3. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan secara terus menerus perlu dilakukan agar terciptanya iklim usaha dikalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Razak. (2013). Ratusan Karang Taruna Mati Suri. Diakses dari www.harianjogja.com pada tanggal 10 Mei 2014, Jam 20.00 WIB;
- Ambar Teguh. (2004). Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
- Bidang Integrasi Pengolahan Data Statistik. (2013). Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2013. Yogyakarta: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- BPPNFI Regional I. (2009). Pedoman Kewirausahaan Lembaga Kepemudaan. Medan: BPPNFI.
- Dewanto Jati N. (2012). Pemberdayaan Pemuda Melalui Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta. Skripsi. UNY;
- Djuju Sudjana. (2004). Manajemen Program Pendidikan. Bandung: Falah Production;

- Gunawan dan Muhtar. (2010). Kontribusi Organisasi Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: P3KS Press;
- Hairi Firmansyah. (2012). Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin;
- Istiana Hermawati, dkk. (2011). Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Yogyakarta: BP2P3KS;
- Jurnal Agribisnis Perdesaan (Volume 02 Nomor 02 tahun 2012). Hlm. 172-180;
- Kemenpora. (1992). Harapan Pak Harto kepada Generasi Muda Indonesia. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
- Lexy J. Moleong. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakrya;
- Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UII Press;
- Mifhachul Huda. (2009). Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Mustofa Kamil. (2011). Pendidikan Non formal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran Dari Komikan Di Jepang). Bandung: Alfabeta;
- Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif. Bandung: Tarsito. Nurul Zuriah. (2007). Metodologi Penelitian Social dan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara;
- Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan social. (2010). Statistic Pemuda Provonsi DIY 2010. Jakarta: CV Ida Sabastian;
- Sugeng Budiharsono. (2013). Pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat pesisir. Presentasi. Jakarta;
- Totok M dan Poerwoko S. (2013). Pemberdayaan Masyarakat (Dalam Perspektif Kebijakan Publik). Bandung: Alfabeta;
- Umberto Sihombing. (2001). Pendidikan Luar Sekolah (Masalah, Tantangan dan Peluang). Jakarta: Wirakarsa;
- Wahjudi Djaja. (2007). Pemuda Harapan Bangsa. Klaten: Cempaka Putih.